

# LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Tahun 2025**



**Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Bekasi**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. LKIP ini disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 ini disusun dengan menyajikan capaian kinerja melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan LKIP ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, serta menjadi acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Bekasi, 31 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**Dr. dr. KUSNANTO SAIDI, M.A.R.S.**  
**Pembina Utama Muda / IV c**  
**NIP. 197306182003121001**

DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                                                                                                | 2  |
| Daftar Isi.....                                                                                                                                     | 3  |
| BAB I       Pendahuluan.....                                                                                                                        | 4  |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                                                                                            | 4  |
| 1.2. Tujuan dan Manfaat.....                                                                                                                        | 7  |
| 1.3. Tugas, Fungsi dan Wewenang.....                                                                                                                | 7  |
| 1.4. Struktur Organisasi.....                                                                                                                       | 8  |
| 1.5. Sumber Daya... ..                                                                                                                              | 12 |
| 1.6. Aspek Strategis dan Isu Strategis.....                                                                                                         | 16 |
| BAB II       Perencanaan Kinerja.....                                                                                                               | 20 |
| 2.1. Visi Misi RPJMD 2025 - 2029.....                                                                                                               | 20 |
| 2.2. Rencana Strategis.....                                                                                                                         | 22 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja.....                                                                                                                        | 25 |
| BAB III      Akuntabilitas Kinerja.....                                                                                                             | 28 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....                                                                                                                | 28 |
| 1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.....                                                                              | 36 |
| 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....                        | 37 |
| 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | 41 |
| 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....                                                                           | 44 |
| 5. Analisis penyebab program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....                                     | 47 |
| 6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya.....                                                                                              | 49 |
| 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....                                       | 54 |
| 3.2. Realisasi Anggaran.....                                                                                                                        | 60 |
| BAB IV Penutup .....                                                                                                                                | 69 |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                                                                                | 69 |
| 4.2. Rencana Tindak.....                                                                                                                            | 70 |
| Lampiran :                                                                                                                                          |    |
| Perjanjian Kinerja                                                                                                                                  |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini juga mengacu pada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sakip meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintah yang fokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyusunan Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dilakukan sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Dokumen IKU ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja organisasi sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berikut adalah IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi:



Tabel 1.1.1

IKU DPPKB KOTA BEKASI

| TUJUAN                            | SASARAN                               | INDIKATOR                                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | PENANGGUNGJAWAB                                                                                         | KET |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                   |                                       |                                                   | ALASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                          | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                                                                         |     |
| Meningkatnya Ketangguhan Keluarga | Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga                       | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya Pasal 47. Implementasi operasionalnya diatur melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Peraturan BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022                                          | Ibanga = Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan : 3                                                                                  | 65.50        | 66.00 | 66.50 | 67.00 | 67.50 | 68.00 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan<br><br>Kepala Bidang Keluarga Berencana |     |
|                                   |                                       | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. IPBK diatur secara teknis melalui peraturan BKKBN, yaitu Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2024, serta didukung Keputusan BKKBN Nomor 228/KEP/D1/2023 sebagai alat ukur, monitoring, dan evaluasi pembangunan | Indeks Komposit (rata-rata tertimbang atau rata-rata geometrik) dari nilai kelima dimensi (partisipasi berkelanjutan, pemihakan, integrasi dan kesetaraan) | 68.10        | 69.10 | 70.10 | 70.10 | 72.10 | 73.10 | Kepala Bidang Ketahanan dan<br><br>Kesejahteraan Keluarga                                               |     |



Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengarahkan upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance).

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

## **1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;

- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada wali kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai kewenangan untuk menangani urusan Pemerintah Daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi adalah Aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Bekasi.

#### **1.4 Struktur Organisasi**

DPPKB Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 125 Seri D), maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

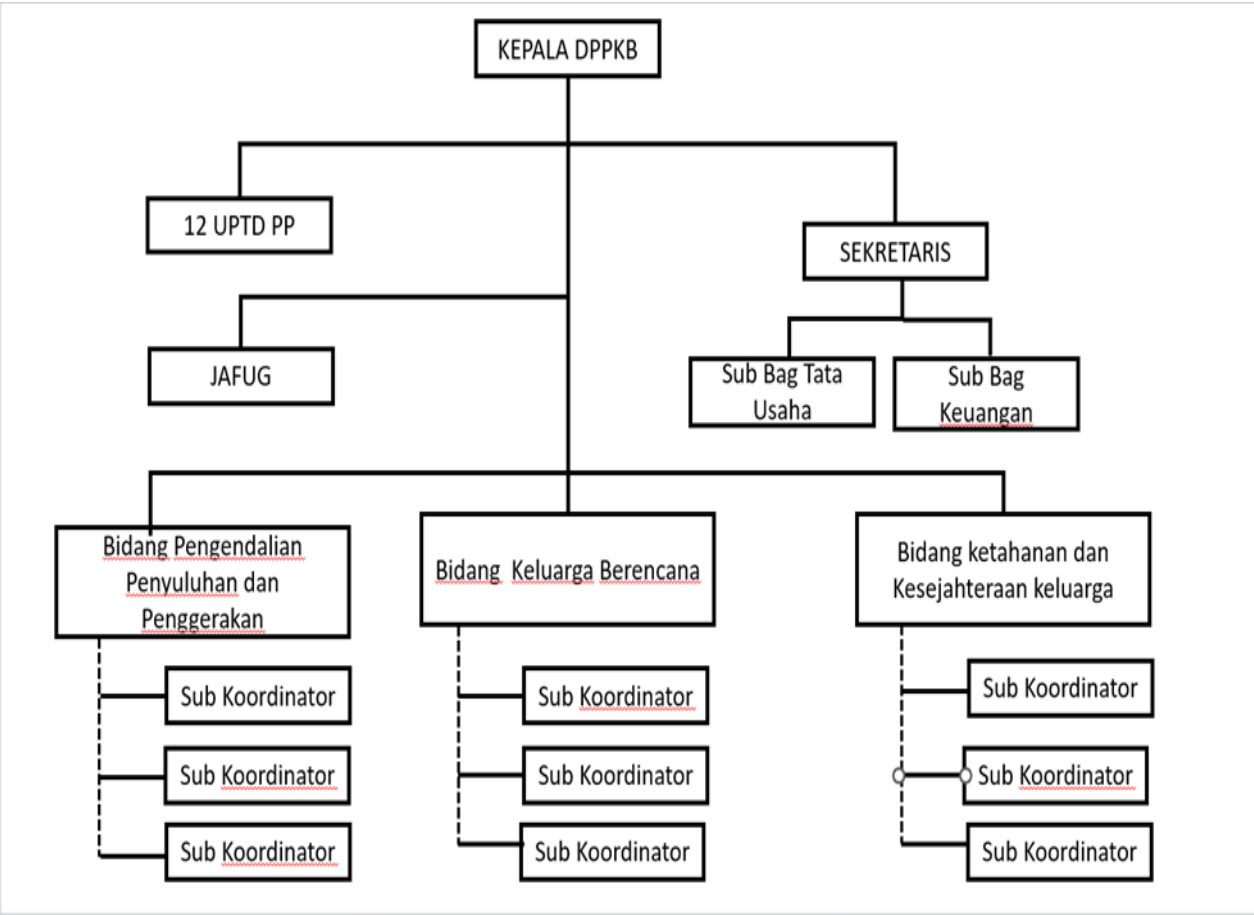
Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi terdiri atas:



1. Kepala Dinas, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha:
    - Penelaah Teknis Kebijakan
    - Pengolah Data dan Informasi
    - Pengadministrasi Perkantoran
    - Arsiparis Ahli Muda (JFT)
    - Arsiparis Ahli Pertama (JFT)
  - b. Sub bagian Keuangan:
    - Penelaah Teknis Kebijakan
    - Pengolah Data dan Informasi
    - Pengadministrasi Perkantoran
3. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan pergerakan, membawahkan:
  - a. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda (JFT)
  - b. Penelaah Teknis Kebijakan
  - c. Pengadministrasi Perkantoran
4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
  - a. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda (JFT)
  - b. Penelaah Teknis Kebijakan
  - c. Pengadministrasi Perkantoran
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
  - a. Penata Kependudukan Keluarga Berencana Ahli Muda (JFT)
  - b. Penelaah Teknis Kebijakan
  - c. Pengadministrasi Perkantoran
6. 12 UPTD PP Kecamatan;
  - a. Pengadministrasi Perkantoran



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

3. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 125 Seri D).



1.5 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Bekasi mempunyai sumber daya manusia yang di uraikan sebagai berikut :

**Tabel 1.5.1**  
**Daftar Jabatan Dan Pemangku Jabatan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| URAIAN JABATAN                                          |   | PEMANGKU JABATAN                 |
|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------|
| Kepala Dinas                                            | : | Dr.dr.Kusnanto Saidi,MARS        |
| Sekretaris                                              | : | Fitri Widyati, S.STP.,M.Si.      |
| Kepala Bidang Pengendalian, Penyululan dan Penggerakan  | : | dr.Eni Herawati Tandjung, M.H    |
| Kepala Bidang Keluarga Berencana                        | : | drg. Dezi Syukrawati, MARS.      |
| Kepala Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga      | : | dr. Johnny Timbul Pardomuan, MM. |
| Kepala Sub Bagian Keuangan                              | : | Sri Hastutiningsih, SE           |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha                            | : | Susilawati, MA                   |
| Jabatan Fungsional Ahli Muda Penata Kependudukan dan KB | : | Agus Muharam, S.Hum              |
| Jabatan Fungsional Ahli Muda Penata Kependudukan dan KB | : | Dwi Agus Sumarni, S.Si, SPT      |
| Jabatan Fungsional Ahli Muda Penata Kependudukan dan KB | : | Rohamah, SE.,M.Si.               |
| Jabatan Fungsional Ahli Muda Penata Kependudukan dan KB | : | Risa Dwi Puspita, SE.,M.Si.      |

Sumber Data : Subbag TU DPPKB Kota Bekasi



Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi per tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 62 ASN yang terdiri dari 39 PNS dan 23 P3K dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 1.5.2**  
**Jumlah ASN Menurut Golongan**

| URAIAN        | JUMLAH        | KETERANGAN |
|---------------|---------------|------------|
| Golongan IV   | 10 ASN        |            |
| Golongan III  | 27 ASN        |            |
| Golongan II   | 2 ASN         |            |
| P3K           | 23 ASN        |            |
| <b>Jumlah</b> | <b>62 ASN</b> |            |

Sumber : Subbag TU DPPKB Kota Bekasi 2025

**Tabel 1.5.3**  
**Jumlah ASN Menurut Eselon**

| URAIAN             | JUMLAH        | KETERANGAN |
|--------------------|---------------|------------|
| Eselon II          | 1 ASN         |            |
| Eselon III.a       | 1 ASN         |            |
| Eselon III.b       | 3 ASN         |            |
| Eselon IV.a        | 14 ASN        |            |
| Jabatan Fungsional | 4 ASN         |            |
| Pelaksana / P3K    | 39 ASN        |            |
| <b>Jumlah</b>      | <b>62 ASN</b> |            |

Sumber : Subbag TU DPPKB Kota Bekasi



**Tabel 1.5.4**  
**Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan**

| URAIAN        | JUMLAH        | KETERANGAN |
|---------------|---------------|------------|
| S3            | 2 ASN         |            |
| S2            | 17 ASN        |            |
| S1            | 25 ASN        |            |
| D3            | 3 ASN         |            |
| SLTA          | 15 ASN        |            |
| <b>Jumlah</b> | <b>62 ASN</b> |            |

*Sumber : Subbag TU DPPKB Kota Bekasi*

Untuk Sumber Daya Manusia yang menduduki Eselon II dan III sudah sesuai dengan formasi yang tersedia, sedangkan untuk jabatan fungsional masih terdapat kekosongan jabatan disebabkan ASN yang pensiun belum ada pengangkatan pengisian jabatan tersebut.

Terdapat juga pegawai dengan status lainnya di bawah BKKBN Pusat yang ditempatkan di daerah, termasuk unit pelaksanaannya (DPPKB Kota Bekasi), didukung oleh 18 Orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), 5 orang P3K dan 3 Orang Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) yang merupakan tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang status kepegawaian sebagai pegawai pusat BKKBN yang ditempatkan di Kota Bekasi.

Tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melaksanakan pembinaan keluarga, termasuk di tingkat kelurahan (PLKB/PKB/TPD/K Tribina Keluarga) dan memberikan penyuluhan, pendampingan, dan memfasilitasi program keluarga berencana untuk masyarakat.

Kurangnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kota Bekasi menjadi isu signifikan karena memengaruhi cakupan penyuluhan dan pelayanan KB, dimana rasio saat ini sangat timpang (misalnya 1:1 per



area), menyebabkan PLKB kewalahan menangani wilayah luas, keterbatasan edukasi dan konseling intensif, serta tantangan dalam mencapai target program nasional, meski ada upaya pemberdayaan kader untuk membantu. Analisis menunjukkan kendala ini berdampak pada kurang meratanya jangkauan program KB, terutama di daerah yang belum terjangkau strategi DPPKB secara maksimal, sehingga perlu solusi rekrutmen atau optimalisasi SDM yang lebih efektif.

Untuk Penyuluh Keluarga Berencana masih membutuhkan tenaga tambahan SDM sesuai dengan Indikator Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk adalah 1:2, Kota Bekasi mempunyai 56 Kelurahan maka diperlukan tenaga sebanyak 112 Orang.

**b. Sumber Daya Sarana**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, DPPKB Kota Bekasi dilengkapi sarana dan prasana berupa :

**Tabel 1.5.6**  
**Aset DPPKB Kota Bekasi**

| NO | JENIS BARANG                     | JUMLAH | KETERANGAN                      |
|----|----------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1  | Kendaraan Roda 4 Mobil           | 8      | 8 Kondisi Baik                  |
| 2  | Kendaraan Roda 2 Motor           | 59     | 54 Kondisi Baik, 5 rusak sedang |
| 3  | PC Unit Komputer                 | 46     | Kondisi Baik                    |
| 4  | Laptop Note Book                 | 40     | Kondisi Baik                    |
| 5  | Personal Komputer                | 9      | Kondisi Baik                    |
| 6  | Proyektor Infokus                | 10     | Kondisi Baik                    |
| 7  | AC Unit                          | 3      | Kondisi Baik                    |
| 8  | Alat Kantor                      | 224    | Kondisi Baik                    |
| 9  | Meubel                           | 1      | Kondisi Baik                    |
| 10 | Alat Kedokteran KB / Alat Peraga | 39     | Kondisi Baik                    |

Sumber : Data Aset DPPKB Kota Bekasi

## **1.6 Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi**

### **a. Aspek Strategis**

Aspek strategis dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagai berikut:

- Pengendalian Penduduk & Pertumbuhan Penduduk: Melakukan evaluasi laju pertumbuhan penduduk melalui kebijakan dan penyuluhan untuk menciptakan keluarga sejahtera.
- Keluarga Berencana (KB) & Kesehatan Reproduksi: Meningkatkan pelayanan dan akses alat kontrasepsi guna menekan angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran.
- Peningkatan Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga: Pelaksanaan program-program yang memperkuat kualitas keluarga agar lebih mandiri dan sejahtera.
- Percepatan Penurunan Stunting: Aspek strategis terkini yang menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga.
- Penyuluhan & Penggerakan: Penguatan peran penyuluh lapangan dalam memberikan advokasi dan edukasi mengenai program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana).
- Akuntabilitas Kinerja: Menyajikan perbandingan data antara perencanaan (target) dan hasil capaian nyata selama satu tahun anggaran, yang meliputi efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran

### **b. Isu Strategis**

Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang bersumber dari Isu Strategis Kota Bekasi adalah :

1. Upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengendalian penduduk, keluarga berencana dengan mengatasi masalah stunting, ketahanan keluarga, dan pendewasaan usia perkawinan Pemenuhan Layanan Dasar.
2. Cakupan peserta KB aktif dan peserta baru belum optimal, terutama pada metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

3. Perkawinan dini berdampak pada meningkatnya risiko stunting, kesehatan ibu-anak, dan tingginya angka kemiskinan.
4. Belum optimalnya integrasi program Bangga Kencana dengan percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga.

### **c. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki tugas utama merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pelayanan KB, serta pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bangga Kencana). Kegiatan utamanya meliputi:

- Pelayanan KB : Penyediaan kontrasepsi (pil, implan, suntik, kondom, IUD/spiral) dan pelayanan KB pasca persalinan.
- Penyuluhan dan KIE : Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perencanaan keluarga, stunting, dan kesehatan reproduksi.
- Pembinaan Ketahanan Keluarga : Kelompok binaan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- Pengendalian Penduduk : Pemetaan parameter kependudukan, penyusunan data mikro (pendataan keluarga), dan penguatan Kampung KB.

Adapun Layanan Produk Organisasi sebagai berikut:

- Pelayanan KB Berkualitas: Konseling, pemasangan, dan pelepasan alat kontrasepsi.
- Konseling Keluarga: Melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau konselor sebaya.
- Dokumen Data Penduduk: Penyediaan data mikro dan informasi kependudukan untuk perencanaan daerah.
- Fasilitasi Kelompok Genre (Generasi Berencana): Pembinaan duta Genre dan remaja.
- Pelayanan Pendampingan Stunting: Melalui tim pendamping keluarga (TPK) dan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil).

#### **d. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **1. Capaian Kerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);

## 2. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Visi Misi RPJMD 2025 - 2029

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tahun 2025-2029 dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peranan penting dalam mendorong tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam Tupoksi Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian mengenai kondisi umum masa kini dan kondisi lima tahun ke depan yang diinginkan yang dijadikan dasar dalam menentukan keberlanjutan pembangunan Kota Bekasi.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mengacu pada visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 yaitu:

- **Visi** : Kota Bekasi Semakin Nyaman dan Sejahtera
- **Misi** : Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan lingkungan Kehidupan Perkotaan Baik Jasmani Maupun Rohani, Yang makin Kondusif Dan Berkelanjutan. sasaran Indeks Pembangunan Keluarga.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut ditetapkan cara sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kehidupan Berkeluarga

- Mendorong remaja dan calon pasangan usia subur untuk mengikuti program edukasi dan konseling pranikah.
- Memperkuat peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

#### 2. Penguatan Program Bangga Kencana

- Meningkatkan kesertaan dan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi modern.

- Memperluas cakupan pelayanan KB yang merata dan terjangkau.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

- Mengembangkan usaha ekonomi produktif keluarga melalui kelompok UPPKSA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor).
- Fasilitasi akses keluarga ke lembaga keuangan dan pelatihan keterampilan.

### 4. Penguatan Ketahanan Sosial dan Mental Spiritual

- Membina keluarga dalam nilai-nilai agama, budaya, dan gotong royong.
- Peningkatan fungsi komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.

### 5. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi.

- Memperluas layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita.
- Pencegahan pernikahan dini, stunting, dan kekerasan dalam rumah tangga.

### 6. Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi

- Mengoptimalkan pendataan keluarga dan pemutakhiran data secara berkala.
- Memanfaatkan digitalisasi untuk layanan, edukasi, dan pemantauan keluarga.

### 7. Kemitraan dan Kolaborasi

- Memperkuat sinergi dengan perangkat daerah, Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
- Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta kader PKK dalam program pemberdayaan keluarga.

#### a. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan mewujudkan keluarga sejahtera dengan Indikator yaitu:

- Presentasi keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga
- Persentase Lansia yang mendapatkan pendampingan



b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)

Dengan Indikator yaitu:

- Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ModernContraceptive (mCPR);
- Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) yaitu wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi.
- Presentasi kehamilan yang tidak direncanakan (KTD)

c. Program Pengendalian Penduduk

Persentase cakupan data mikro keluarga

Dengan Indikator yaitu:

- Angka Kelahiran Total (Total Fertility rate /TFR)
- Angka Kelahiran Remaja 15-19 Tahun (Age Spesific fertility rate / ASFR 15-19)

## 2.2 Rencana Strategis

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran pada Rancangan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, maka dirumuskan tujuan yaitu sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Ketangguhan Keluarga** dengan indikator **Indeks pembangunan Keluarga (Ibangga)**.





**Tabel. 2.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran dan Indikator**  
**Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2025-2029**

| TUJUAN                            | SASARAN                               | INDIKATOR                                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | PENANGGUNGJAWAB                                                                                         | KET |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                   |                                       |                                                   | ALASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                          | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                                                                         |     |
| Meningkatnya Ketangguhan Keluarga | Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga                       | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya Pasal 47. Implementasi operasionalnya diatur melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Peraturan BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022                                          | Ibangga = Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan : 3                                                                                 | 65.50        | 66.00 | 66.50 | 67.00 | 67.50 | 68.00 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan<br><br>Kepala Bidang Keluarga Berencana |     |
|                                   |                                       | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. IPBK diatur secara teknis melalui peraturan BKKBN, yaitu Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2024, serta didukung Keputusan BKKBN Nomor 228/KEP/D1/2023 sebagai alat ukur, monitoring, dan evaluasi pembangunan | Indeks Komposit (rata-rata tertimbang atau rata-rata geometrik) dari nilai kelima dimensi (partisipasi berkelanjutan, pemihakan, integrasi dan kesetaraan) | 68.10        | 69.10 | 70.10 | 70.10 | 72.10 | 73.10 | Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                      |     |

Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tahun 2025–2030 berfokus pada peningkatan kualitas pembangunan keluarga melalui dua ukuran utama, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan Indeks Pembangunan Keluarga BKKBN (IPBK).

Kedua indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga di Kota Bekasi. Peningkatan yang berkesinambungan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya arah kebijakan yang terukur dan berorientasi pada pencapaian kualitas keluarga yang lebih baik.

## **2.3 PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan kinerja adalah proses strategis menetapkan tujuan, sasaran, dan standar kinerja yang jelas serta terukur untuk individu, tim, atau organisasi, sebagai penjabaran dari rencana strategis, untuk menyelaraskan upaya dengan tujuan utama, mengidentifikasi sumber daya, dan memandu pencapaian target dalam periode waktu tertentu. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- 2) Pemetaan jabatan fungsional;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 4) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 5) Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
- 6) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam upaya mencapai akuntabilitas, Instansi Pemerintah yang baik dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta instansi pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dibuat sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun 2025.

Berikut adalah lampiran perjanjian kinerja atau penetapan kinerja antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi.

**Tabel. 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja DPPKB Tahun 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                            | Indikator Kinerja                                                                    | Target    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1) | (2)                                                                          | (3)                                                                                  | (4)       |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja profesionalisme pengelolaan dan pelayanan | 1. Nilai AKIP                                                                        | 74.53     |
| 2.  | Mempertahankan kesertaan ber-KB                                              | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat                                                        | 86,39     |
|     |                                                                              | 3. Prevalensi stunting kota Bekasi                                                   | 8%        |
|     |                                                                              | 4. Persentasi peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)              | 13        |
|     |                                                                              | 5. Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)                                        | 50        |
|     |                                                                              | 6. Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) | 18,50 %   |
|     |                                                                              | 7. Rumah data Kependudukan                                                           | 42        |
|     |                                                                              | 8. Jumlah kampung KB                                                                 | 56        |
|     |                                                                              | 9. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi                            | 67,5      |
|     |                                                                              | 10. Persentasi Masyarakat yang terjangkau Program bangga kencana                     | 80 %      |
|     |                                                                              | 11. Median Usia kawin Pertama (MUKP)                                                 | 22 - 25   |
|     |                                                                              | 12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                           | 80 – 90 % |

Sumber : Perjanjian Kinerja DPPKB Tahun 2025

| Program                                                        | Anggaran           | Ket<br>(APBD/PAD/DAU/<br>HIBAH/dII) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 14.787.759.435 | APBD                                |
| 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.    | Rp. 11.468.600.000 | APBD dan BOKB                       |
| 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana                        | Rp. 4.964.085.000  | APBD dan BOKB                       |
| 4. Program Pengendalian Penduduk                               | Rp. 1.829.519.968  | APBD dan BOKB                       |
| Total                                                          | Rp. 33.049.964.403 |                                     |

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja yang disusun memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya. Rumus pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = ( \text{Realisasi/Rencana} ) \times 100 \%$$



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

| No | Rentang Capaian                    | Kategori        |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Capaian $\geq 100\%$               | Memuaskan       |
| 2. | $85\% \leq \text{capaian} < 100\%$ | Sangat Berhasil |
| 3. | $70\% \leq \text{capaian} < 85\%$  | Berhasil        |
| 4. | $55\% \leq \text{capaian} < 70\%$  | Cukup Berhasil  |
| 5. | Capaian $\leq 55\%$                | Kurang Berhasil |

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya sesuai capaian IKU RPD 2024-2026 dan capaian IKU RPJMD 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**a. Capaian IKU RPD 2024-2026**

Realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra 2024-2026**

| No | Tujuan                                  | Indikator Tujuan          | Sasaran                                                                         | Indikator Sasaran                             | Satuan | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja Sasaran |      |      | Realisasi Tahun 2025 |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------|------|------|----------------------|
|    |                                         |                           |                                                                                 |                                               |        |                     | 2024                   | 2025 | 2026 |                      |
| 1. | Mewujudkan akutabilitas                 | Akutabilitas Kinerja      | Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pengelolaan dan Pelayanan | Nilai AKIP                                    | Persen | 74.05               | 74.05                  | 76   | 77   | 74,58                |
| 2. | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | Mempertahankan kesertaan ber-KB                                                 | Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan                | unit   | 6                   | 8                      | 10   | 12   | 12                   |
|    |                                         |                           |                                                                                 | Presentase Cakupan anggota poktan yang ber KB | Persen | 55                  | 60                     | 65   | 70   | 65                   |

Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akutabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah**

Berdasarkan tabel di atas, hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akutabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan layanan Pemerintah dengan indikator Nilai AKIP ditetapkan pada tahun 2025 target sebesar 76 dengan realisasi 74,58 capaian kinerja 98,18 dengan skala pengukuran sangat berhasil.

Sasaran ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025**

| NO | Sasaran                                      | TAHUN 2025         |                |        |
|----|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|
|    |                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 13.980.790.037     | 11.551680.122  | 82,62% |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 DPPKB

Capaian kinerja sasaran tersebut dicapai melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **Sasaran Strategis 2 : Mempertahankan Kesertaan Ber-KB**

Sasaran Strategis Mempertahankan Kesertaan ber-KB dapat dilihat pada 2 (dua) indikator berikut ini :

#### **1. Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) aktif di Kecamatan**

Analisis indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) aktif di Kecamatan bertujuan mengukur cakupan dan aksesibilitas pelayanan keluarga, melihat sebaran lokasi, serta membandingkan tingkat aktivitasnya antar kecamatan untuk memastikan keluarga yang membutuhkan, termasuk yang pra-sejahtera atau rentan, dapat mengakses KIE, konseling, dan rujukan secara efektif.

Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) aktif di Kecamatan target yang ditetapkan adalah 10, realisasi mencapai 12 maka capaian kinerja sebesar 120 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 tercapai dan melebihi target dengan skala pengukuran memuaskan.

PPKS beroperasi melalui pendekatan siklus 8 fungsi keluarga, perbaikan karakter, dan 4 prinsip dasar keluarga (berkumpul, berinteraksi, berdaya serta berbagi dan peduli).



2. Persentase Cakupan Anggota Poktan berKB

Indikator ini diukur pada kelompok sasaran seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk memastikan partisipasi aktif dalam program KB untuk kesejahteraan keluarga.

Persentase cakupan anggota Poktan BKB (Bina Keluarga Balita) mengukur seberapa banyak keluarga balita yang terjangkau program dari total target keluarga balita, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan orang tua untuk pengasuhan optimal.

Persentase Cakupan Anggota Poktan berKB target 65% realiasi 65% dengan capaian kinerja 100% disimpulkan bahwa indikator ini berhasil dengan kategori memuaskan.

b. Capaian IKU RPJMD 2025-2029

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Adapun capaian indikator kinerja diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3  
Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target RPJMD 2025-2029

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN                            | SASARAN                               | INDIKATOR                                         | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | Realisasi Tahun 2025 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|                                     |                                   |                                       |                                                   | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                      |
| (1)                                 | (2)                               | (3)                                   | (4)                                               | (5)          | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                 |
| Meningkatnya Ketangguhan Keluarga   | Meningkatnya Ketangguhan Keluarga |                                       | Indeks Pembangunan Keluarga                       | 65.50        | 66.00 | 66.50 | 67.00 | 67.50 | 68.00 | 67.9                 |
|                                     |                                   | Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | 68.10        | 69.10 | 70.10 | 71.10 | 72.10 | 73.10 | 71.0                 |

Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

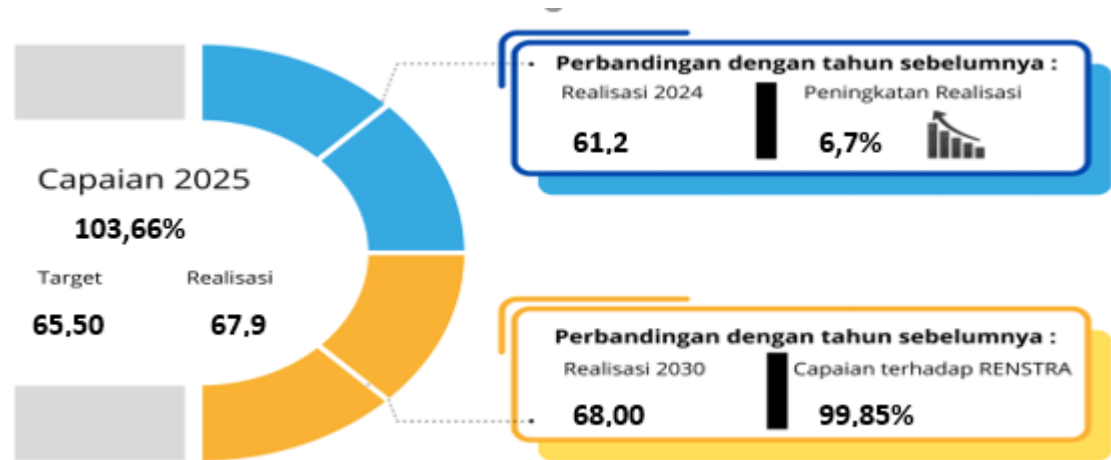


**Tabel 3.3**  
**Realisasi Indikator Kinerja Pada Tahun 2025 dengan Target RPJMD 2025-2029**

| TUJUAN                            | SASARAN                               | INDIKATOR                                         | PENJELASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | PENANGGUNGJAWAB                                                                                         | KET |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                   |                                       |                                                   | ALASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                          | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                                                                         |     |
| Meningkatnya Ketangguhan Keluarga | Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga                       | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya Pasal 47. Implementasi operasionalnya diatur melalui Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Peraturan BKKBN) Nomor 3 Tahun 2022                                          | Ibangga = Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan : 3                                                                                 | 65.50        | 66.00 | 66.50 | 67.00 | 67.50 | 68.00 | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan<br><br>Kepala Bidang Keluarga Berencana |     |
|                                   |                                       | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. IPBK diatur secara teknis melalui peraturan BKKBN, yaitu Peraturan BKKBN Nomor 5 Tahun 2024, serta didukung Keputusan BKKBN Nomor 228/KEP/D1/2023 sebagai alat ukur, monitoring, dan evaluasi pembangunan | Indeks Komposit (rata-rata tertimbang atau rata-rata geometrik) dari nilai kelima dimensi (partisipasi berkelanjutan, pemihakan, integrasi dan kesetaraan) | 68.10        | 69.10 | 70.10 | 70.10 | 72.10 | 73.10 | Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                      |     |

Adapun capaian dari masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

**a. Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)”**



**Tabel 3.1.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**

| No. | Indikator Kinerja                     | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1   | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | 65,50  | 67,9      | 103,66%         |

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha

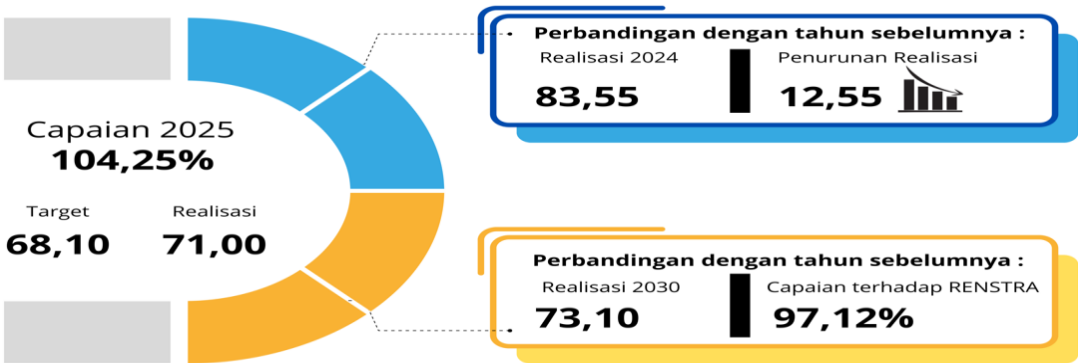
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)” sudah tercapai bahkan melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 67,9 dari target 65,50 capaian kinerja 103,66% dengan kategori memuaskan.

Beberapa aspek yang diukur dalam IBANGGA meliputi :

1. Ketahanan Keluarga (fisik, ekonomi, dan sosial).
2. Kesehatan Reproduksi : Termasuk penggunaan KB, kualitas kesehatan ibu dan anak.
3. Pendidikan : Terutama dalam aspek pendidikan anak dan keterampilan orang tua.
4. Pemberdayaan Ekonomi : Fokus pada peran keluarga dalam kegiatan ekonomi dan kewirausahaan.
5. Fungsi Sosial dan Psikologis : Meliputi kualitas hubungan keluarga, pengelolaan konflik, dan peran keluarga dalam mendidik anak-anak.



**b. Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi”**



**Tabel 3.1.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi**

| No. | Indikator Kinerja                                      | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 1   | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi | 68.10  | 71.0      | 104,25          |

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja “Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi” target yang ditetapkan 68,10 dengan realisasi 71,0 capaian kinerja 104,25% dengan kategori memuaskan.

Pengukuran IPBK ini bertujuan memantau evaluasi pembangunan di tingkat kota agar tetap berorientasi pada kualitas manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kota Bekasi diukur berdasarkan lima dimensi utama, meliputi partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan. Indikator ini memantau kualitas hidup melalui jaminan kesehatan, Contraceptive Prevalence Rate (CPR), angka partisipasi sekolah, rumah layak, hingga penurunan stunting, dengan tujuan membangun kota cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan.



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

Tabel 3.1.1  
Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                                                            | Indikator Kinerja                                                                    | Target | Realisasi | Capaian Kinerja(%) | Kategori        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------------|
| 1   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja profesionalisme pengelolaan dan pelayanan | 1. Nilai AKIP                                                                        | 74,53  | 74,58     | 100,06             | Memuaskan       |
| 2   | Mempertahankan kesertaan berKB                                               | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                                                        | 86,39% | 86,99%    | 100,69             | Memuaskan       |
|     |                                                                              | 2. Prevalensi Stunting Kota Bekasi                                                   | 8%     | 3,36%     | 238,09             | Memuaskan       |
|     |                                                                              | 3. Persentasi peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)              | 13%    | 13,69%    | 105,30             | Memuaskan       |
|     |                                                                              | 4. Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)                                        | 50%    | 54,2%     | 108,4              | Memuaskan       |
|     |                                                                              | 5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) | 18,50% | 13,6%     | 136,02             | Memuaskan       |
|     |                                                                              | 6. Rumah data kependudukan                                                           | 42     | 42        | 100                | Sangat Berhasil |
|     |                                                                              | 7. Jumlah Kampung KB                                                                 | 56     | 56        | 100                | Sangat Berhasil |
|     |                                                                              | 8. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi                            | 67,5   | 71,0      | 105,18             | Memuaskan       |
|     |                                                                              | 9. Persentasi Masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana                      | 80%    | 67,9      | 84,87              | Berhasil        |
|     |                                                                              | 10. Median Usia Kawin Pertama (MUKP)                                                 | 22-25  | 21,8      | 99,09              | Sangat Berhasil |
|     |                                                                              | 11. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                           | 80-90% | 86,13     | 100                | Sangat Berhasil |

Sumber Data : Data DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.1.1 di atas, capaian kinerja mencapai 100% bahkan beberapa indikator capaian kinerja di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis beserta indikator kinerja tercapai dengan baik.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1  
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

| No. | Sasaran Strategis                                                    | Indikator Kinerja                                                       | Target 2025 | Realiasi 2023 | Realisasi 2024 | Realisasi 2025 | Capaian Kinerja (%) | Kategori        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1   | Meningkatnya akuntabilitas profesionalisme pengelolaan dan pelayanan | 1. Nilai AKIP                                                           | 74,53       | 72,06         | 74,53          | 74,58          | 100,06              | Memuaskan       |
| 2   | Mempertahankan kesertaan berKB                                       | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat                                           | 86,39%      | -             | -              | 86,99          | 132,60              | Memuaskan       |
|     |                                                                      | 2. Keluarga beresiko stunting                                           | -           | -             | 60.047 KK      | -              | -                   | -               |
|     |                                                                      | 3. Prevalensi Stunting Kota Bekasi                                      | 8%          | -             | -              | 3,36%          | 238,09              | Memuaskan       |
|     |                                                                      | 4. Median usia kawin pertama (MUKP) usia 25-49 tahun                    | 22-25 thn   | 23,76 thn     | 23,76 thn      | 21,8           | 99,09               | Sangat Berhasil |
|     |                                                                      | 5. Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) | 13%         | -             | -              | 13,69%         | 105,30              | Memuaskan       |
|     |                                                                      | 6. Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)                           | 50%         | -             | 59,71%         | 54,2%          | 108,4               | Memuaskan       |
|     |                                                                      | 7. Panjang angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR)               | 6           | 7,7           | 6              |                |                     |                 |



LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |  |                                                                                                                                                |         |       |         |       |        |                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|-------|--------|-----------------|
|  |  | 8. Unmeet Need (Wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi | 18,50%  | 5,00  | 15,65%  | 13,6% | 136,02 | Memuaskan       |
|  |  | 9. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi                                                                                    | -       | 35,57 | -       | -     | -      | -               |
|  |  | 10. Rumah data kependudukan                                                                                                                    | 42 data | -     | 44 data | 42    | 100    | Sangat berhasil |
|  |  | 11. Presentasi kampung KB Mandiri                                                                                                              | 56      | -     | 56      | 56    | 100    | Sangat berhasil |
|  |  | 12. Presentasi masyarakat yang terjangkau program bangga kencana                                                                               | 80%     | -     | 80%     | 67,9  | 84,87  | Berhasil        |
|  |  | 13. Data dan informasi keluarga                                                                                                                | -       | -     | 100%    | -     | -      | -               |
|  |  | 14. GDPK                                                                                                                                       | -       | -     | 100%    | -     | -      | -               |
|  |  | 15. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi                                                                                     | 67,5    | -     | -       | 71,0  | 105,18 | Memuaskan       |
|  |  | 16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran                                                                                                     | 80-90%  | 87    | 92      | 86,13 | 100    | Sangat Berhasil |

Sumber Data : Data DPPKB Kota Bekasi

Tingkat pencapaian kinerja indikator Sasaran sebagaimana pada tabel diatas secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas profesionalisme pengelolaan dan pelayanan

- Sasaran ini diukur oleh indikator sebagaimana ditampilkan dalam tabel 3.1.2, yaitu indikator Nilai AKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Tahun 2023 ditetapkan Nilai AKIP dengan target 75 % realisasi sebesar 72,06 capaian kinerja sebesar 96,08%. Sedangkan Tahun 2024 target nilai AKIP yaitu 74.05, dan untuk realisasinya adalah 74,53 capaian kinerja sebesar

100,65%. Tahun 2025 target Nilai Akip sebesar 74,53 realisasi 74,58 capaian kinerja 100,06% dengan skala pengukuran memuaskan, bahwa capaian tersebut sudah melebihi dengan target.

## **Sasaran 2 : Mempertahankan Kesertaan Ber-KB**

Pada Tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat perbedaan pada jumlah indikator kinerja. Tahun 2023 ada 3 (tiga) indikator kinerja sedangkan tahun 2024 sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja. Tahun 2025 Sasaran strategis didukung 11 (sebelas) indikator kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Mempertahankan kesertaan ber-KB dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator yang mengukur kinerja dengan menilai kinerja unit pelayanan publik secara objektif dan berkala. Indikator ini target 86,39% realisasi 86,99% kategori memuaskan.
2. Kota Bekasi juga telah meraih penghargaan sebagai salah satu kota dengan prevalensi stunting terendah di bawah 14 persen.
3. Hasil capaian kinerja indikator persentase Cakupan Peserta KB Aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) target pada tahun 2025 adalah sebesar 13% dengan realisasi indikator kinerja sebesar 13,69% capaian kinerja 105,30% skala pengukuran memuaskan.
4. Hasil capaian kinerja indikator angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) target sebesar 50 realisasi 54,2 capaian kinerja 108,4% kategori memuaskan.
5. DPPKB Kota Bekasi mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan kelahiran dan penggunaan metode kontrasepsi untuk meningkatkan kualitas keluarga. Hal ini didukung indikator Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet Need) dengan target 18,50% realisasi 13,6 dengan capaian kinerja 136,02% kategori memuaskan.
6. Rumah data kependudukan berorientasi untuk meningkatkan tata kelola data di tingkat kelurahan/kecamatan ditetapkan target 42 realisasi 42 capaian kinerja 100% kategori memuaskan.
7. Jumlah kampung KB di kota Bekasi mencapai 56 kampung KB dari target 56 kampung KB dan sudah terealisasi 100% dengan kategori sangat berhasil.

8. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi merupakan instrumen pengukuran untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah telah menempatkan penduduk sebagai fokus utama. Indikator ini ditargetkan sebesar 67,5 dengan realisasi 71,0 kategori memuaskan.
9. Presentasi masyarakat yang terjangkau program bangga kencana dioptimalkan melalui sosialisasi bersama mitra kerja (seperti Komisi IX DPR RI) ke berbagai wilayah, termasuk Bekasi Utara dan Selatan, untuk menyasar ibu hamil, balita, dan remaja guna penurunan stunting. Program ini meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Remaja (BKR), Lansia (BKL), serta Kampung KB Mandiri untuk mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas. Indikator ini berhasil dari target 80% realisasi 67,9%.
10. Median Usia Kawin Pertama (MUKP) usia 25-49 tahun dengan target 22-25 realisasi 21,8 tahun dan capaian kinerja 99,09% skala pengukuran sangat berhasil.  
Indikator ini sebagai salah satu upaya yang berhasil untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau berpeluang semakin banyak anak yang dilahirkan.
11. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditetapkan target 80-90% dari anggaran yang ditetapkan dengan realisasi 86,13% capaian kinerja 100% hal ini menunjukkan bahwa indikator ini dilaksanakan sangat berhasil.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja sasaran Meningkatkan kesertaan ber-KB menunjukkan angka capaian kinerja terendah 84,87 dan capaian kinerja tertinggi 136,02%. Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan memuaskan.

Capaian sasaran tersebut dicapai melalui 4 (empat) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Penduduk;
3. Program Keluarga Berencana;
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3.1**  
**Perbandingan realisasi indikator kinerja RPJMD 2025-2029**

| No | Indikator                                              | Satuan | Target 2025 | Realisasi | Capaian Kinerja | Kategori  |
|----|--------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1  | Nilai AKIP                                             | Nilai  | 74,53       | 74,58     | 100,06          | Memuaskan |
| 2  | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)                  | Persen | 65,50       | 67,9      | 84,87           | Berhasil  |
| 3  | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi | Nilai  | 68.10       | 71.0      | 104,25          | Memuaskan |

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akutabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah**

Berdasarkan tabel di atas, hasil pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akutabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan layanan Pemerintah dengan indikator Nilai AKIP ditetapkan pada tahun 2025 target sebesar 76 dengan realisasi 74,58 capaian kinerja 98,18 dengan skala pengukuran sangat berhasil.

Sasaran ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.3.2**  
**Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025**

| NO | Program                                      | TAHUN 2025         |                |        |
|----|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|
|    |                                              | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 13.980.790.037     | 11.551680.122  | 82,62% |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 DPPKB

Capaian kinerja sasaran tersebut dicapai melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **Sasaran Strategis 2 : Mempertahankan Kesertaan Ber-KB**

- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) terus menunjukkan tren positif, di mana capaian pada 2024 mencapai 61,2, meningkat dari 60,15 di tahun 2023. Sedangkan capaian pada tahun 2025 sebesar 67,9, indeks ini mengukur kualitas keluarga melalui dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan, dengan target peningkatan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah.

iBangga diukur berdasarkan tingkat ketentraman (keharmonisan), kemandirian (ekonomi/pendidikan), dan kebahagiaan keluarga serta meningkatkan kualitas keluarga melalui program-program yang berfokus pada ketahanan dan kesejahteraan.

- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi. IPBK memastikan pembangunan yang berorientasi pada kualitas penduduk. Target IPBK 2025 merupakan indikator kinerja dalam perencanaan daerah, khususnya pada program pengendalian penduduk. Target Tahun 2025 ditetapkan 67,5 dengan realisasi 71,0 capaian kinerja sebesar 105,18 dengan kategori memuaskan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 3.3.3**  
**Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra 2024-2026**

| No | Tujuan                                  | Indikator Tujuan          | Sasaran                                                                          | Indikator Sasaran                             | Satuan     | Kondisi Awal (2024) | Target Kinerja Sasaran |      |      | Realisasi Tahun 2025 |
|----|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------|------|----------------------|
|    |                                         |                           |                                                                                  |                                               |            |                     | 2024                   | 2025 | 2026 |                      |
| 1. | Mewujudkan akuntabilitas                | Akuntabilitas Kinerja     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pengelolaan dan Pelayanan | Nilai AKIP                                    | Perse<br>n | 74.05               | 74.05                  | 76   | 77   | 74,58                |
| 2. | Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | Mempertahankan kesertaan ber-KB                                                  | Jumlah PPKS Aktif di Kecamatan                | unit       | 6                   | 8                      | 10   | 12   | 12                   |
|    |                                         |                           |                                                                                  | Presentase Cakupan anggota poktan yang ber KB | Perse<br>n | 55                  | 60                     | 65   | 70   | 65                   |

Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 2026

Terdapat perbedaan indikator sasaran ke-2 pada RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029 yaitu :

**Sasaran Strategis 2 : Mempertahankan Kesertaan Ber-KB**

Sasaran Strategis Mempertahankan Kesertaan ber-KB dapat dilihat pada 2 (dua) indikator berikut ini :

- **Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) aktif di Kecamatan**

Analisis indikator Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) aktif di Kecamatan bertujuan mengukur cakupan dan aksesibilitas pelayanan keluarga, melihat sebaran lokasi, serta membandingkan tingkat aktivitasnya antar kecamatan untuk memastikan keluarga yang membutuhkan, termasuk yang pra-sejahtera atau rentan, dapat mengakses KIE, konseling, dan rujukan secara efektif.



Jumlah PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) aktif di Kecamatan target yang ditetapkan adalah 10, realisasi mencapai 12 maka capaian kinerja sebesar 120 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 tercapai dan melebihi target dengan skala pengukuran memuaskan.

PPKS beroperasi melalui pendekatan siklus 8 fungsi keluarga, perbaikan karakter, dan 4 prinsip dasar keluarga (berkumpul, berinteraksi, berdaya serta berbagi dan peduli).

- **Persentase Cakupan Anggota Poktan berKB**

Indikator ini diukur pada kelompok sasaran seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk memastikan partisipasi aktif dalam program KB untuk kesejahteraan keluarga.

Persentase cakupan anggota Poktan BKB (Bina Keluarga Balita) mengukur seberapa banyak keluarga balita yang terjangkau program dari total target keluarga balita, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan orang tua untuk pengasuhan optimal.

Persentase Cakupan Anggota Poktan berKB target 65% realisasi 65% dengan capaian kinerja 100% disimpulkan bahwa indikator ini berhasil dengan kategori memuaskan.

#### **4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada indikator utama Kemendukbangga/BKKBN (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN) di tingkat nasional sebagai berikut:

1. Total Fertility Rate (TFR)

TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). Ini

adalah indikator penting untuk mengukur tingkat kesuburan suatu populasi dan memantau pertumbuhan penduduk.

Analisis TFR Jawa Barat menunjukkan Proyeksi 2020-2025: TFR diperkirakan tetap di sekitar 2.12 anak per wanita.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi :

- Pendidikan: Semakin tinggi tingkat pendidikan wanita, umumnya semakin rendah TFR-nya.
- Usia Menikah: Usia menikah pertama yang lebih rendah cenderung meningkatkan jumlah anak.
- Pendapatan & Penggunaan Kontrasepsi: Pendapatan dan penggunaan alat kontrasepsi juga memengaruhi tingkat fertilitas.
- Urbanisasi: Di banyak wilayah, TFR di perkotaan lebih rendah dibanding pedesaan, meskipun kesenjangan ini mulai menipis.

TFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total di Kota Bekasi berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 1,97 anak per perempuan, yang berarti rata-rata seorang perempuan di Bekasi melahirkan hampir 2 anak selama masa reproduksinya, menunjukkan angka yang cukup rendah dan mendekati angka pengganti (replikasi) populasi. Angka ini didapatkan dari data BPS Badan Pusat Statistik dan digunakan untuk memantau pertumbuhan penduduk.

## 2. Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun

Median usia kawin pertama (ASFR) merupakan Angka kelahiran pada kelompok usia remaja untuk menurunkan kehamilan tidak diinginkan.

Median usia kawin pertama di Jawa Barat untuk awal 2025 masih mengacu data tren, dengan perkiraan sekitar 19 tahun ke atas, meskipun ada data awal 2025 di Databoks (Katadata) menunjukkan angka cukup rendah (sekitar 16,5 tahun untuk menikah dini), namun data resmi BPS dan tren nasional

cenderung menunjukkan median wanita sekitar 22.3 tahun pada 2024, jadi di Jabar mungkin di sekitar angka tersebut atau sedikit di bawahnya, dengan perempuan masih lebih muda dari laki-laki.

Tidak ada angka median resmi Jawa Barat tahun 2025 yang spesifik, tetapi data awal 2025 dan 2024 menunjukkan Jawa Barat memiliki angka pernikahan dini yang signifikan, bahkan termasuk tertinggi di Indonesia dalam beberapa kategori statistik, meskipun angka median resmi BPS cenderung lebih tinggi (sekitar 22 tahun). Secara hukum, usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.

Data median usia kawin pertama (MUKP) Kota Bekasi tahun 2025 belum tersedia secara spesifik, tetapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi menjadikan target MUKP sebagai salah satu indikator kinerja, mengindikasikan tren kenaikan usia nikah untuk menciptakan keluarga berkualitas sesuai Program Bangga Kencana.

Meningkatkan usia kawin pertama bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar lebih matang secara fisik, mental, dan ekonomi, sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan menurunkan risiko stunting, seperti yang digariskan dalam program BKKBN.

### 3. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber\_KB tidak terpenuhi (unmetneed)

Data Unmet Need Pelayanan Kesehatan di Jawa Barat tahun 2025 menunjukkan angka 5,68% menurut data BPS, yang artinya lebih dari setengah juta penduduk Jawa Barat mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan penting. Angka ini menempatkan Jawa Barat di atas rata-rata nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025-2025 menargetkan penurunan angka unmet need pelayanan kesehatan, menunjukkan pemerintah provinsi menyadari isu ini dan berupaya mengatasinya.

Untuk Kota Bekasi Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetned) pada tahun 2025 sebesar 13,6%, Sementara target adalah sebesar 18,50%. Sehingga capaian tersebut 136,02 % sangat memuaskan.

#### 4. Persentasi Pesrta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Data spesifik persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk seluruh Jawa Barat di tahun 2025 belum tersedia secara luas, namun tren menunjukkan peningkatan penggunaan MKJP nasional di 2024 sekitar 25,5%, dan Jawa Barat termasuk provinsi dengan data yang bervariasi, Pada Tahun 2024 Pengguna MKJP di Indonesia mencapai 25,5%, naik dari tahun sebelumnya, yang menandakan keberhasilan program KB jangka panjang.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi terus mengupayakan peningkatan motivasi dan kompetensi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk mendukung pencapaian target.

### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi berdasarkan dokumen Renstra 2024-2026 adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja profesionalisme dan pelayanan serta Meningkatkan kesertaan berKB.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.1  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

| NO | Sasaran                                                                          | Indikator Kinerja                             | Analisis Keberhasilan/Kegagalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Solusi yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan | Nilai AKIP                                    | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Memperbaiki kinerja OPD                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)              | Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sudah semakin baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meningkatkan profesionalisme SDM dalam Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Mempertahankan Kesertaan ber-KB                                                  | Jumlah PPKS aktif di kecamatan                | UPPKS didukung oleh tenaga lapangan (PKB/PLKB) yang aktif melakukan pendampingan, memfasilitasi pembentukan kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Optimalisasi Pemberdayaan Kelompok UPPKS di kecamatan-kecamatan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas produk                                                                                                                               |
|    |                                                                                  | Presentase Cakupan anggota poktan yang ber KB | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pelayanan KB yang gratis dan mudah diakses oleh masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB sehingga meningkatkan jumlah akseptor baru dan aktif.</li> <li>- Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai penyedia layanan dan fasilitator telah berhasil meningkatkan akses dan partisipasi dalam program KB</li> <li>- Kesadaran fasilitas kesehatan (faskes) meningkat untuk melaporkan tentang jumlah peserta KB baru, peserta KB aktif, jenis metode kontrasepsi yang digunakan, ketersediaan alokon, hingga cakupan pelayanan, ketersediaan alokon, dan meningkatkan kualitas layanan demi mencapai target.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan kontrasepsi secara gratis</li> <li>2. Peningkatan pelatihan bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB</li> <li>3. Pengelolaan Alat kontrasepsi lebih rapi</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <div> <div>- Penggunaan Alat sudah terstandar menggunakan alat antropometri.</div> <div>Alat antropometri (timbangan, pengukur tinggi/panjang badan, pita LiLA) berperan vital dalam pelayanan KB (Keluarga Berencana) dengan menilai status gizi ibu hamil/subur, mengidentifikasi risiko kesehatan seperti stunting/gizi buruk, menentukan kelayakan penggunaan alat kontrasepsi tertentu (misalnya implan, IUD, pil KB), memantau perkembangan ibu dan janin, serta memberikan edukasi gizi, sehingga membantu pengambilan keputusan medis dan perbaikan kualitas kesehatan keluarga secara keseluruhan.</div> <div>- Kegiatan berjalan sesuai Program Bangga Kencana fokus pada pembangunan keluarga berkualitas, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana seperti penyuluhan stunting, pendampingan balita-remaja-lansia, advokasi, penguatan data berbasis teknologi, dan melibatkan TP PKK serta kader di tingkat kelurahan.</div> </div> | <div> <div>4. Peningkatan kualitas pelayanan KB</div> <div>5. Optimalisasi Kegiatan melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) dan pencatatan via aplikasi New SIGA.</div> </div> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber daya anggaran serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi memiliki 62 orang ASN yang terdiri dari 39 PNS dan 23 P3K.

Tenaga penyuluh Keluarga Berencana yang terdiri dari :

- a. 19 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah tenaga fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang status kepegawaian sebagai pegawai pusat BKKBN yang ditempatkan di Kota Bekasi.
- b. 12 orang Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) yang diangkat oleh Provinsi Jawa Barat yang ditempatkan di Kota Bekasi.
- c. 22 orang Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang ditempatkan di dinas dan UPTD PP Kecamatan.

Jumlah Penyuluh Tidak Memadai sehingga Rasio penyuluh terhadap jumlah penduduk/desa binaan tidak seimbang, mengakibatkan jangkauan penyuluhan terbatas.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di DPPKB Kota Bekasi masih kurang berdasarkan tingginya beban kerja.

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan sumber daya personil adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM melalui diklat atau pelatihan.
2. Perencanaan kebutuhan pegawai yang jelas untuk perencanaan depan.

#### **b. Sumber Daya Anggaran**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 31.443.574.005,- sumber dana APBD dan BOKB-DAK Non Fisik yang dijabarkan dalam 4 program dengan rincian sebagai berikut:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota pagu anggaran Rp. 13.980.790.037,-
2. Program Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan pagu anggaran Rp. 464.310.000,-
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) pagu anggaran Rp.4.934.628.968,-
4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pagu anggaran Rp. 12.063.485.000,-

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja secara keseluruhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 31.443.574.005,- dan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar Rp. 27.083.190.208,-.

Penyerapan anggaran Tahun 2025 pada program dan kegiatan sebesar 86,13% dari target yang telah ditentukan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja anggaran karena menyesuaikan kebutuhan atau efisiensi anggaran.

Upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien.

Program yang paling berdampak terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Program Keluarga Berencana (KB), khususnya peningkatan jumlah peserta KB aktif dan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Program ini secara langsung menekan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan Total Fertility Rate (TFR), serta meningkatkan kualitas keluarga.

Selain itu, berikut beberapa kegiatan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja:

1. Peningkatan Peserta KB Aktif & Baru: Fokus pada pelayanan kontrasepsi, terutama MKJP (IUD, Implan, MOW, MOP) untuk meningkatkan kualitas pengguna KB dan efektivitas pengendalian.



2. Penggerakan Kelompok Bina Keluarga: Meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) untuk pembangunan keluarga berkualitas.
3. Penyuluhan dan Konseling (KIE): Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga.
4. Pemberdayaan Kampung KB: Penguatan Kampung KB di tingkat desa/kelurahan untuk mendekatkan pelayanan komprehensif ke masyarakat.

**c. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagian ada dalam kondisi Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB). Lebih jelas kondisi sarana dan prasarana DPPKB Kota Bekasi saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.1**  
**Aset DPPKB Kota Bekasi Tahun 2025**

| NO | JENIS BARANG                        | JUMLAH | KETERANGAN                      |
|----|-------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1  | Kendaraan Roda 4 Mobil              | 8      | 8 Kondisi Baik                  |
| 2  | Kendaraan Roda 2                    | 59     | 54 Kondisi Baik, 5 rusak sedang |
| 3  | Motor                               | 46     | Kondisi Baik                    |
| 4  | PC Unit Komputer                    | 40     | Kondisi Baik                    |
| 5  | Laptop Note Book                    | 9      | Kondisi Baik                    |
| 6  | Personal Komputer                   | 10     | Kondisi Baik                    |
| 7  | Proyektor Infokus                   | 3      | Kondisi Baik                    |
| 8  | AC Unit                             | 224    | Kondisi Baik                    |
| 9  | Alat Kantor                         | 1      | Kondisi Baik                    |
| 10 | Meubel                              | 39     | Kondisi Baik                    |
|    | Alat Kedokteran KB /<br>Alat Peraga |        |                                 |

Sumber : Data Aset DPPKB Kota Bekasi

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana adalah :

1. Menyimpan sarana dan prasarana dengan baik
2. Penyaluran sarana dan prasana ke UPTD PP kecamatan
3. Inventaris aset dinas untuk tertib administrasi dan memudahkan menghitung jumlah aset yang dimiliki
4. Pemeliharaan aset secara layak dan rutin agar dapat berfungsi dengan baik
5. Penghapusan aset kondisi rusak berat agar tidak terjadi pemborosan biaya pemeliharaan.

#### **d. Analisis Efisiensi Material / Bahan**

Analisis efisiensi material / bahan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berfokus pada optimalisasi penggunaan bahan habis pakai seperti ATK, media KIE, dan alat kontrasepsi guna mencapai target program KB, penurunan TFR/Stunting.

Berdasarkan hal tersebut, efisiensi material/bahan digunakan untuk perencanaan kebutuhan, distribusi yang tepat sasaran, dan evaluasi berkala. Dengan menggunakan data riil (misalnya cakupan peserta KB aktif) untuk memproyeksi kebutuhan sehingga menghindari kelebihan stok atau kekurangan stok.

#### **e. Analisis Efisiensi Metode**

Analisis efisiensi metode Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengukur seberapa optimal sumber daya (anggaran, waktu, tenaga) digunakan untuk mencapai hasil program KB, menurunkan laju pertumbuhan penduduk, TFR, dan Unmet need. Analisis Komponen Efisiensi Metode dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- Pelayanan kontrasepsi langsung (MKJP - Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) di faskes sering kali lebih efisien daripada metode jangka pendek yang membutuhkan pengulangan, karena menghemat waktu petugas dan biaya pelayanan.
- Sosialisasi penyuluh lapangan (PLKB) dinilai efisien untuk mencakup berbagai lapisan masyarakat.
- Penggunaan data berbasis digital (contoh: SIGA - Sistem Informasi Keluarga) meningkatkan efisiensi pendataan dan pemantauan dibandingkan metode manual.

**7.Analis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7.1**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

| No. | Sasaran                           | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                        | Output Program /Kegiatan                                                                                                                                                          | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Meningkatnya akutabilitas kinerja | Nilai Akip        | 74,53  | 74,58     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                       | Menunjang                  |
|     |                                   |                   |        |           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Terpenuhinya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 100%                                                                            | Menunjang                  |
|     |                                   |                   |        |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, 5 laporan | Menunjang                  |



LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |  |  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                               |           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                      | Persentase keuangan perangkat daerah, 100 %                                                                                   | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 1.372 orang/bulan                                                          | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1 laporan | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                          | Persentase administrasi umum perangkat daerah, 100 %                                                                          | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                            | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, 2 Paket                                                                   | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                     | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, 2 paket                                                          | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                        | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, 1 laporan                                                | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, 12 laporan                                                                           | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, 100 %                                       | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya, 5 unit                       | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasioanal/Lapangan | kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya, 60 unit                          | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    | Peralatan dinas yang dipelihara, 30 unit                                                                                      | Menunjang |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                      | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 100 %                                                                                                                                       | Menunjang |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan , 12 Laporan                                                                                                          | Menunjang |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, 12 Laporan                                                                                                                             | Menunjang |
| <b>Analisis :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas tata Kelola Pemerintah yang professional</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>3. Mengoptimalkan fungsi koordinasi</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah</li> <li>5. Dilaksanakannya Rapat evaluasi setiap triwulan untuk membahas realisasi kinerja</li> </ol> |                                  |                                               |    |    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mempertahan kan kesertaan ber-KB | Presentase Cakupan anggota poktan yang ber KB | 65 | 65 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                           | Persentase Cakupan Data Mikro Keluarga                                                                                                                                                                       | Menunjang |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Persentase cakupan data mikro keluarga, 80%                                                                                                                                                                  | Menunjang |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    | Pembentukan dan operasionalisasi rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangga kencana di sektor lain | Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di sektor lain yang dibentuk, 28 unit | Menunjang |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                               | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                                      | Menunjang |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                               |    |    | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai                                       | Terlaksananya kegiatan hari keluarga nasional dan dukungan                                                                                                                                                   | Menunjang |



LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  |  |  | Kearifan Budaya Lokal                                                                                                                                                 | program KIE, 100%                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|  |  |  |  |  | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana                                                                                                 | Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluh bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana), 12 laporan                                                                                    | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan minilokakarya (Minilok) | Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) melalui raoat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi desa (Rakordes), dan Mini lokakarya (Minilok), 3000 laporan | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                       | Persentase capaian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), 100%                                                                                                                                                | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)                                                                                                                 | Jumlah kader yang mengikuti pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP), 392 orang                                                                                                                                                         | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Pembinaan IMP dan program bangga kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               | Jumlah organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB, 85 organisasi                                                                 | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota                                          | Presentase hasil kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota, 100%                                                                                        | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Pengendalian pendistribusian alat dan                                                                                                                                 | Persentase hasil kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Menunjang |

LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan kejarungnya                                                                     | pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota,382 5 Orang"                                           |                  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                       | Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), 3825 orang                                                                               | Menunjang        |
|  |  |  |  |  | Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB                                                                                                                                        | Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB, 57 unit                                                                                                                                  | Menunjang        |
|  |  |  |  |  | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                     | Persentase capaian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKb, 100% | Menunjang        |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di kampung keluarga berkualitas                                                                                              | Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana), 25 kampung       | Menunjang        |
|  |  |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                             | <b>Cakupan Pus yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi ( Unmeetneed)</b>                                                                                                                  | <b>Menunjang</b> |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                         | Terlaksananya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga / UPPKA), 100%                           | Menunjang        |
|  |  |  |  |  | Penyediaan Biaya Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) | Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan                                                         | Menunjang        |



LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                               | pendapatan keluarga akseptor /UPPKA) yang tersedia, 154 unit                                                                                                                                                          |           |
|  |  |  |  |  | Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)                          | Terlaksananya pelatihan terhadap kelompok PIK-R di Kota Bekasi, 40 kelompok                                                                                                                                           | Menunjang |
|  |  |  |  |  | Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) | Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga / UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan, 5877 orang | Menunjang |

Analisis :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan kb dan ketersediaan alat kontrasepsi.
2. Pemenuhan sarana dan prasana yang lebih baik dalam rangka mengoptimalisasikan pelaksanaan program kb.
3. Optimalisasi kinerja kampung kb.
4. Adanya kerja sama antara UPTD PP,PKB,PLKB dan Kader dalam mensosialisasikan KB ke berbagai lapisan masyarakat.
5. Koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak seperti BKKBN Provinsi Jawa Barat





3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan APBD Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1  
Pagu Anggaran DPPKB Kota Bekasi  
Per Program Tahun 2025

| NO | PROGRAM                                                       | PAGU ANGGARAN     |                   |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                               | SETELAH PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
|    |                                                               | (Rp.)             | (Rp.)             |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 14.787.759.435    | 13.973.278.517    |
| 2. | Program Pengendalian Penduduk                                 | 656.400.000       | 464.310.000       |
| 3. | Program Pembinaan Keluarga Berencana                          | 6.137.204.968     | 4.934.628.968     |
| 4. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera       | 11.468.600.000    | 12.063.845.000    |
|    | TOTAL                                                         | 33.049.964.403    | 31.436.062.485    |

Sumber : Data Pagu Anggaran 2025



**Tabel 3.2.2**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran**  
**Setelah P-APBD Per Program Tahun 2025**

| No | Program                                                 | Anggaran              | Realisasi             | Capaian Kinerja<br>% |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | 13.973.278.517        | 11.551.443.372        | 82,62                |
| 2. | Program Pengendalian Penduduk                           | 464.310.000           | 198.664.693           | 42,79                |
| 3. | Program Pembinaan Keluarga Berencana                    | 4.934.628.968         | 4.106.416.622         | 83,22                |
| 4. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | 12.063.845.000        | 10.361.231.770        | 95,37                |
|    | <b>TOTAL</b>                                            | <b>31.436.062.485</b> | <b>22.873.422.607</b> | <b>86,13</b>         |

Sumber : Data Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran sebesar 86,13 % dari pagu anggaran yang ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target anggaran disebabkan karena adanya efisiensi anggaran atau menyesuaikan kebutuhan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dukung 4 (empat) program yang ditujukan secara langsung mencapai target kinerja dan indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 33.049.964.403,- di efisiensi menjadi Rp.31.436.062.485,-.

Dengan demikian, jika dilihat dari sisi pagu anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2025 dapat disimpulkan dari sisi pagu anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan kondisi yang baik, karena setiap program dan kegiatan yang di targetkan berhasil dilaksanakan.

Adapun Perbandingan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 dan tahun 2025 pada masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.3  
Perbandingan anggaran dan realisasi belanja  
Tahun 2024 dan Tahun 2025

| No | Tahun 2024                                                                                                       |                    |                    |        | Tahun 2025                                                                                                    |                            |                           |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|    | Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                        | Anggaran<br>(Rp.)  | Realisasi<br>(Rp.) | Persen | Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                  | Anggaran<br>(Rp.)          | Realisasi<br>(Rp.)        | Persen       |
| 1  | Perencanaan<br>,<br>Penganggaran<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            | 5.000.000          | 4.910.000          | 98,20  | Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                             | 5.000.000                  | 4.871.235                 | 97,42        |
|    | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja<br>SKPD | 5.000.000          | 4.910.000          | 98,20  | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar<br>Realisasi<br>Kinerja SKPD | 5.000.000                  | 4.871.235                 | 97,42        |
| 2  | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                  | 11.280.662.<br>000 | 9.469.679.<br>523  | 86,24  | <b>Administras<br/>i Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                                                    | <b>11.795.34<br/>3.000</b> | <b>9.685.022.<br/>917</b> | <b>82,11</b> |
|    | Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjuangan<br>ASN                                                                      | 11.275.662.<br>000 | 9.464.764.<br>523  | 86,23  | Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjuangan<br>ASN                                                                   | 11.790.343<br>.000         | 9.680.114.<br>386         | 82,10        |
|    | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                    | 5.000.000          | 4.915.000          | 98,30  | Koordinasi<br>dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun<br>SKPD                                 | 5.000.000                  | 4.908.531                 | 98,17        |
|    |                                                                                                                  |                    |                    |        | <b>Administras<br/>i<br/>Kepegawaia<br/>n Perangkat</b>                                                       | <b>59.500.00<br/>0</b>     | <b>59.500.00<br/>0</b>    | <b>100</b>   |



LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|   |                                                      |               |               |       | Daerah                                                             |             |             |       |
|---|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|   |                                                      |               |               |       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | 59.500.000  | 59.500.000  | 100   |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 555.654.000   | 723.728.200   | 95,78 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 560.594.875 | 475.320.878 | 84,78 |
|   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | 438.000.000   | 617.287.000   | 96,75 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 400,000,000 | 386.338.135 | 96,58 |
|   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              | 44.519.000    | 40.878.000    | 91,82 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 20,592,875  | 20.156.353  | 97,88 |
|   |                                                      |               |               |       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 43.820.000  | 19.896.000  | 45,40 |
|   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 63.135.000    | 58.043.200    | 91,94 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | 60,000,000  | 13.800.000  | 23,00 |
|   | Fasilitas Kunjungan Tamu                             | 10.000.000    | 7.520.000     | 75,20 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              | 36.182.000  | 35.130.390  | 97,09 |
|   |                                                      |               |               |       | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 45.932.500  | 42.602.910  | 92,75 |
|   |                                                      |               |               |       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 45.932.500  | 42.602.910  | 92,75 |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.424.150.960 | 1.227.248.395 | 83,25 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 761.949.662 | 691.278.352 | 90,72 |
|   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air          | 100.000.000   | 36.049.333    | 36,05 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan                    | 55,000,000  | 50.783.454  | 92,33 |

LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|   |                                                                                                             |               |               |       |                                                                                                                                               |                    |                    |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|   | dan Listrik                                                                                                 |               |               |       | Listrik                                                                                                                                       |                    |                    |              |
|   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                       | 1.374.150.960 | 1.191.199.062 | 86,69 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                         | 706.949.662        | 640,494,898        | 90,60        |
| 5 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                                | 569.333.840   | 498.690.003   | 87,64 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                  | <b>752.470.000</b> | <b>592.486.395</b> | <b>78,74</b> |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       | 287.000.000   | 244.187.863   | 85,08 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                         | 392.730.000        | 282.463.170        | 71,92        |
|   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasioanal/Lapangan | 232.333.840   | 218.772.140   | 94,16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasioanal/Lapangan                                   | 222,000,000        | 178.371.206        | 80,35        |
|   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                    | 50.000.000    | 36.000.000    | 72,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                      | 46,740,000         | 43.527.000         | 93,13        |
|   |                                                                                                             |               |               |       | Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 97.000.000         | 0                  | 0            |
|   |                                                                                                             |               |               |       | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                | 97.000.000         | -                  | -            |

LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |                                                                                                                                                                       |               |               |       |                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota                                                                                                | 100.000.000   | 99.562.274    | 99,56 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | 183.470.000          | 77.145.373           | 42,04        |
|  | Pembentukan dan operasionalisasi rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana di sektor lain                               | 100.000.000   | 99.562.274    | 99,56 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                                |                      |                      |              |
|  | Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal                                               | 1.248.715.000 | 1.127.702.800 | 90,31 | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>                                        | <b>1.291.948.968</b> | <b>1.197.936.858</b> | <b>92,72</b> |
|  | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana                                                                                                 | 680.400.000   | 607.637.250   | 89,31 | Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana                                                                                                 | 387,845,000          | 382.708.500          | 98,68        |
|  | Pelaksanaan mekanisme operasional program bangsa kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan minilokakarya (Minilok) | 180.000.000   | 177.600.000   | 98,67 | Pelaksanaan mekanisme operasional program bangsa kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan minilokakarya (Minilok) | 240,000,000          | 235.320.000          | 98,05        |
|  | Promosi dan KIE program bangsa kencana melalui media massa cetak dan elektronik                                                                                       | 388.315.000   | 342.465.550   | 88,19 | Promosi dan KIE program bangsa kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media                                                                           | 184,024,968          | 180.015.510          | 97,82        |

LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |                                                                                                                                                   |               |               |       |                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | serta media luar ruang                                                                                                                            |               |               |       | luar ruang                                                                                                                                        |                      |                      |              |
|  | <i>Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</i>                                                                            | 423.200.000   | 408.368.000   | 96,50 | <b>Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                                            | <b>251.770.000</b>   | <b>217.048.616</b>   | <b>86,23</b> |
|  | Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)                                                                                             | 100.000.000   | 99.158.400    | 99,16 | Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)                                                                                             | 251.770.000          | 217.048.616          | 86,23        |
|  | Pembinaan IMP dan program bangga kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB                                                                           | 323.200.000   | 309.209.600   | 95,67 | Pembinaan IMP dan program bangga kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB                                                                           | -                    | -                    | -            |
|  | <i>Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota</i>               | 2.918.115.000 | 2.612.908.050 | 89,54 | <b>Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota</b>               | <b>2.789.660.000</b> | <b>2.124.361.984</b> | <b>76,15</b> |
|  | Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan kejarungnya | 207.000.000   | 88.950.000    | 42,97 | Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan kejarungnya | 123,750,000          | 48.708.000           | 39,36        |
|  |                                                                                                                                                   |               |               |       | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                         | 2.200.710.000        | 1.694.163.984        | 76,93        |
|  | Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang                                                                                | 1.635.135.000 | 1.563.968.050 | 95,65 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas                                                                      | 245,000,000          | 243.700.000          | 99,47        |

LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |                                                                                                                                                                     |             |             |       |                                                                                                                                                                            |                    |                    |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|  | (MKPJ)                                                                                                                                                              |             |             |       | Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                                                |                    |                    |              |
|  |                                                                                                                                                                     |             |             |       | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                                                        | 145.200.000        | 94.800.000         | 65,29        |
|  | Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB                                                                                                                            | 799.980.000 | 713.490.000 | 89,19 | Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                                                              | -                  | -                  | -            |
|  | Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya                                            | 276.000.000 | 246.500.000 | 89,31 | Pemerintah Daerah yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                                                                 | -                  | -                  | -            |
|  |                                                                                                                                                                     |             |             |       | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                                  | 75,000,000         | 42.990.000         | 57,32        |
|  | <i>Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</i> | 85.250.000  | 82.655.000  | 96,96 | <b><i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i></b> | <b>601.250.000</b> | <b>567.066.164</b> | <b>94,31</b> |
|  | Pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di kampung keluarga berkualitas                                                                                  | 85.250.000  | 82.655.000  | 96,96 | Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di kampung Keluarga Berkualitas                                                                                  | 265,250,000        | 234.004.164        | 88,22        |
|  |                                                                                                                                                                     |             |             |       | Pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana di                                                                                                                      | 336,000,000        | 333.065.000        | 99,13        |



LKIP TAHUN 2025 DPPKB Kota Bekasi

|  |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              | kampung keluarga berkualitas                                                                                                                                                                  |                       |                       |              |
|  | <i>Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</i>                                                                                                | 10.979.673.000        | 10.329.675.300        | 98,40        | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                                | <b>12.063.845.000</b> | <b>11.227.114.501</b> | <b>93,06</b> |
|  | Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)                                | 340.000.000           | 287.070.000           | 84,43        | Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)                                | 417.192.000           | 352.782.291           | 84,56        |
|  | Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)                          | 536.313.000           | 512.313.800           | 95,53        | Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)                          | 782.730.000           | 513.100.440           | 65,55        |
|  | Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) | 10.103.360.000        | 9.530.291.500         | 94,33        | Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) | 10.863.923.000        | 10.361.231.770        | 95,37        |
|  |                                                                                                                                                                                               | <b>29.539.753.800</b> | <b>26.585.397.545</b> | <b>90,00</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>31.443.574.005</b> | <b>27.083.639.188</b> | <b>86,13</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan ini didasarkan pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari hasil analisis capaian kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan indikator :
  - LHE AKIP memiliki capaian kinerja sebesar 100,06%, yaitu dari target 74,53 dan realisasi 74,58.
2. Sasaran meningkatnya Kesertaan ber KB dengan capaian indikator sebagai berikut :
  - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pencapaian sebesar 100,69%, dengan nilai realisasi 86,99 dari target 86,39
  - Prevalensi Stunting Kota Bekasi pencapaian sebesar 238,09% dengan nilai realisasi 3,36% dari target 8%
  - Persentasi Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pencapaian sebesar 105,30% dengan nilai realisasi 13,69% dari target 13%
  - Angka pravalensi kontrasepsi modern (mCPR) pencapaian sebesar 113,46% dengan nilai realisasi 56,73% dari target 50%
  - Unmeetneed pencapaian sebesar 201,08% dengan nilai realisasi 9,2% dari target 18,50%

- Rumah data kependudukan pencapaian sebesar 100% dengan nilai realisasi 42% dari target 42%
- Jumlah kampung KB pencapaian sebesar 100% dengan nilai realisasi 56 dari target 56
- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Bekasi pencapaian sebesar 100% dengan nilai realisasi 71,0% dari target 67,5%
- Persentasi masyarakat yang berjangkau program bangga kencana pencapaian sebesar 100% dengan nilai realisasi 80% dari target 80%
- Median Usia Kawin Pertama (MUKP) pencapaian sebesar 100% dengan nilai realisasi 23,76 dari target 22-25
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pencapaian sebesar 100% dengan nilai realisasi 86,13% dari target 80-90%

Indikator kinerja menunjukkan realisasi telah tercapai sesuai dengan target bahkan ada beberapa yang melebihi target.

3. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 31.443.574.005,- realisasi sebesar Rp. 27.083.639.188,- persentase capaian kinerja 100% dikategorikan sangat berhasil.

## **4.2. RENCANA TINDAK**

Langkah – Langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kinerja DPPKB Kota Bekasi adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan organisasi tercapai.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
3. Mengevaluasi dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sehingga dapat membuat kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan.

4. Membuat kebijakan, mensosialisasikan, memberlakukan kebijakan sistem reward dan punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja sehingga dapat memberikan motivasi kepada aparatur.
5. Memperkuat koordinasi antara stakeholder dalam upaya pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Demikian laporan ini disusun agar menjadi bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat meningkatkan capaian kinerja, menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan

  
**KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**Dr. dr. KUSNANTO SAIDI, M.A.R.S.**  
**Pembina Utama Muda / IV c**  
**NIP. 197306182003121001**

